

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi yang menimbulkan beragam tuntutan terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka menciptakan otonomi daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Untuk itu dalam rangka akuntabilitas setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan dituntut agar mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang telah dibuat (Darise, 2008).

Untuk Pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya standar yang diterapkan secara konsisten sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan (SAP) diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Suatu pemerintahan yang telah menerapkan SAP yang baik dan konsisten akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu

opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah (Suhardjo dan Adhi, 2013).

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya terkait dengan Penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Lasoma (2013), yang menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif. Selain itu, dilakukan oleh Kusuma (2012) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selain itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang baik (*good governance*) juga harus diikuti oleh suatu sistem akuntansi yang handal yang dalam hal ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Dengan Penerapan SAKD ini diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah yang dapat dilihat dari pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan.

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ratifah (2012) mengemukakan bahwa SAKD merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi pengendalian dengan pelaporan kinerja pemerintah daerah. SAKD juga diharapkan agar diterapkan oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sistem akuntansi juga memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan keuangan dihasilkan. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan SAKD dengan baik, maka pemerintah daerah harus memenuhi beberapa hal yang merupakan syarat SAKD yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penerapan sistem tersebut (Bastian, 2010).

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis tentang penerapan SAKD diantaranya dilakukan oleh Botutihe (2013), yang berkesimpulan bahwa

penerapan SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014), membuktikan bahwa SAKD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, ini disebabkan karena kebanyakan pegawai di bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan belum menguasai sepenuhnya tentang SAKD. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan daerah yang telah berpedoman pada SAKD ini akan meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71/2010 merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah provinsi daerah (Erlina dkk, 2015). Komponen laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus disusun atau dihasilkan sesuai dengan SAP dan SAKD yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer sesuai dengan Permendagri nomor 64/2013. Mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. (Fajar, 2011). Meskipun

seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem akuntansi keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparaturnya itu sendiri (Jannaini, 2012).

Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Selatan tahun anggaran 2007 - 2015 atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Sejak tahun 2007 – 2013 LKPD Sumatera Selatan mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Untuk tahun 2014 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP) dan untuk tahun 2015 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Data hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Anggaran	Opini Yang Diperoleh dari BPK
2007	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2008	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2009	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2007-2015, 2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa opini BPK terkait LKPD provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan untuk tahun 2014 dan 2015 dari opini WDP menjadi opini WTP. Hasil evaluasi BPK RI menunjukkan bahwa LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan oleh Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, Kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, adanya kelemahan sistem

pengendalian internal (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sumatera Selatan).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada pegawai bagian Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik 1 (satu) serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam penulisan untuk melakukan analisis dan pembahasan. Teori-teori yang digunakan yaitu pengertian standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan pemerintah daerah, dan kualitas laporan keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian, dan hasil penelitian dengan alat regresi berganda.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari simpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.